

PERAN PERSATUAN PERJUANGAN DALAM REVOLUSI INDONESIA TAHUN 1946**ABDUL ROHMAN**

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
E-mail: arrohman1206@gmail.com

Artono

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia tahun 1946, kemerdekaan Indonesia yang baru saja diraih sudah mendapatkan tantangan dengan datangnya Belanda dan Sekutu. Dalam usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia terdapat dua cara yang dilakukan, Pemerintah pusat dibawah Perdana Menteri Sjahrir dengan cara politik diplomasi dan para tokoh politik seperti Tan Malaka yang lebih memilih cara konfrontasi langsung bertempur dengan mengangkat senjata melawan Belanda dan Sekutunya sesuai dengan semangat rakyat Indonesia dan kaum pemuda.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana sejarah berdirinya organisasi Persatuan Perjuangan?, 2. Bagaimana peran organisasi Persatuan Perjuangan dalam revolusi di Indonesia tahun 1946?. Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu: 1. mendeskripsikan sejarah berdirinya organisasi Persatuan Perjuangan, 2. mendeskripsikan peran organisasi Persatuan Perjuangan dalam keberhasilan revolusi di Indonesia tahun 1946.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut, bahwa dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia dari Belanda dan Sekutu, bangsa Indonesia terbagi menjadi dua cara. Pertama pemerintah dibawah Perdana Menteri Sjahrir menggunakan politik diplomasi, Kedua dengan cara konfrontasi langsung sesuai dengan semangat, keberanian rakyat Indonesia dan kaum pemuda. Kebijakan diplomasi yang dijalankan pemerintah menimbulkan kekecewaan, sehingga para tokoh politik yang tidak sejalan mendirikan Persatuan Perjuangan guna menghadapi Belanda dan Sekutunya.

Namun seiring berjalannya waktu Persatuan Perjuangan menjadi organisasi oposisi dalam pemerintahan Perdana Menteri Sjahrir. Peran Persatuan Perjuangan terlihat melalui pengiriman delegasi terhadap pemerintah, aksi massa, dan Minimum Progam jelas merupakan bukti nyata untuk dapat berusaha mewujudkan cita-cita rakyat dan kaum pemuda Indonesia yakni merdeka 100%.

Perbedaan cara yang dilakukan juga berakibat peran Persatuan Perjuangan hanya bertahan dalam waktu tiga bulan. Persatuan Perjuangan dituduh membahayakan dan mengancam persatuan Indonesia, sehingga mengakibatkan berkurangnya organisasi pendukung Persatuan Perjuangan dan organisasi ini dibubarkan pada tanggal 6 juni 1946.

Kata Kunci : Mempertahankan kemerdekaan, Diplomasi, Konfrontasi, Persatuan Perjuangan.

Abstract

In the early of the independence of Indonesia in 1946, the independence of Indonesia, which has just been achieved, has to face challenge with the arrival of Dutch and its allies. In an effort to defend the independence of Indonesia, there are two ways to counter the arrival. The central government under the prime minister Sjahrir takes diplomatic way and politicians such as Tan Malaka who prefers confrontation way by directly attacking the Dutch and its allies with spirit of Indonesian people and young men.

Problem which is discussed in this thesis is :1) how is the history of the establishment of Persatuan Perjuangan Organization? 2) How is the role of Persatuan Perjuangan Organization in revolution of Indonesia in 1946? This research aims : 1) to descript the history of the establishment of Persatuan Perjuangan Organization and 2) to descript the role of Persatuan Perjuangan Organization in the successful of revolution of Indonesia in 1946.

Result of this research is that effort to defend the independence and the sovereignty of Indonesia from Dutch and its allies consists of two ways. The first way is the central government under prime minister Sjahrir uses diplomatic way and the second way is by direct confrontation with the spirit and the bravery of Indonesian people and young men. The diplomatic policy of the government raised disappointment so politicians who stand in different way established Persatuan Perjuangan organization in order to face Dutch and its allies.

However, along with the time, Persatuan Perjuangan became an oppositional organization in the government of prime minister Sjahrir. Role of Persatuan Perjuangan can be seen through delegating its representative into government,

mass action, and minimum program. Those constitute conclusive evidence to actualize ideals of Indonesian people and young men that is 100% independence.

The difference ways result in role of Persatuan Perjuangan Organization survived only in three months. Persatuan Perjuangan Organization was accused of endangering and threatening the unity of Indonesia so that Persatuan Perjuangan losses its support and then was dissolved on June 6, 1946.

Keywords: defending the independence, diplomatic way, confrontation, Persatuan Perjuangan

PENDAHULUAN

Sejak dahulu, Indonesia dikenal sebagai salah satu wilayah yang subur dan kaya akan sumber daya alam. Letak geografis yang sangat strategis menjadikan Indonesia sebagai tanah yang menjanjikan hasil bumi yang besar bagi negara lain. Hal itulah yang menjadikan faktor bagi negara-negara kolonial menjadikan Indonesia sebagai negara jajahan.

Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan hasil perjuangan rakyat Indonesia yang selama ini dijajah oleh Belanda selama 350 tahun serta pendudukan Jepang yang berumur 3,5 tahun. Namun setelah kemerdekaan dapat diraih, perjuangan bangsa Indonesia masih belum berakhir dan tugas yang lebih berat bagi rakyat Indonesia adalah harus mempertahankan kemerdekaan tersebut. Di negara yang baru lahir seperti Indonesia, muncul banyak konflik antara pejuang kemerdekaan dengan pihak musuh (penjajah) yang ingin menguasai kembali Indonesia. Adanya upaya sekutu untuk menguasai kembali Indonesia membuat situasi semakin tidak stabil. Kedatangan sekutu pada tanggal 15 September 1945 di Tanjung Priok, memunculkan kembali perlawanan dari rakyat Indonesia untuk bersatu melawan sekutu yang memiliki persenjataan lengkap dan modern serta baru saja memenangkan perang dunia II di berbagai kota di Indonesia seperti di Surabaya, Medan, dan Ambarawa.¹ Banyak korban telah berjatuh dalam usaha rakyat Indonesia dalam usaha mempertahankan kemerdekaan dari serangan Belanda dan sekutu.

Pertempuran yang dilakukan rakyat untuk melawan sekutu tidak sejalan dengan sikap pemerintah pusat yang lebih memilih diplomasi. Pertempuran yang dilakukan rakyat Indonesia untuk melawan sekutu tidak sejalan dengan sikap pemerintah, pemerintah yang saat itu menetapkan politik diplomasi dalam perjuangan kemerdekaan. Politik diplomasi yang merupakan wujud dari politik demokratisasi yang digariskan oleh Sutan Syahrir yang tertuang dalam brosurnya *Perjuangan Kita*. Brosur yang diterbitkan pada bulan November 1945, menunjukkan bahwa Perdana Menteri Sjahrir benar-benar memiliki gagasan tentang suatu revolusi sosialis internasional yang akan bersifat demokratis, antibangsawan, dan antifasis (dengan demikian menentang tokoh-tokoh seperti Soekarno yang memngagumi gagasan-gagasan Jepang).

Kebijakan pemerintah pusat banyak mengecewakan beberapa tokoh politik salah satunya Tan Malaka. Menyaksikan situasi seperti ini, maka Tan Malaka berkesimpulan perlunya mengkoordinasi semua partai, badan, tentara, dan laskar yang terpecah-pecah (terutama antara Partai Islam dan Sosialis di Pekalongan, Cirebon, dan Periang) untuk menentang diplomasi Belanda yang dibantu oleh tentara Inggris. Tan Malaka merasa perlu ikut berjuang secara terang-terangan setelah beberapa tahun bekerja secara sembunyi-sembunyi.²

Tan Malaka yang memiliki pengaruh kuat di akar rakyat revolusioner, dengan dibantu beberapa pemuda, mengundang beberapa organisasi politik, ekonomi, sosial, keagamaan, kelaskaran, dan ketentaraan untuk mendirikan Persatuan Perjuangan.³ Di sinilah kemudian disepakati Minimum Program yang intinya adalah mutlak menghendaki kemerdekaan Indonesia 100%, baru setelah itu tercapai maka politik diplomasi dipertimbangkan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Minimum program dari gagasan Tan Malaka ini memiliki pengaruh yang sangat besar bagi rakyat Indonesia. Terbukti dengan disepakatinya bahwa minimum program Tan Malaka tersebut dijadikan sebagai program Persatuan Perjuangan.

Dalam perjalanan organisasi Persatuan Perjuangan antara tahun 1946, banyak peran Persatuan Perjuangan yang sangat penting dalam situasi politik di Indonesia. Dalam hal ini peran Persatuan Perjuangan yang lebih menjadi oposisi pemerintah. Persatuan Perjuangan sangat berperan aktif dalam Revolusi Indonesia, meskipun Persatuan Perjuangan menjadi organisasi oposisi pemerintah pusat dan hanya mampu bertahan dalam kurun beberapa bulan saja. Akan tetapi, peran-peran serta kebijakannya memberikan dampak yang positif bagi keberhasilan Revolusi di Indonesia. Pada akhirnya Persatuan Perjuangan mengalami kemunduran dikarenakan Persatuan Perjuangan yang tetap menjadi oposisi dan terus berkonfrontasi dengan tokoh-tokoh politik pemerintah Indonesia pada saat itu.

Penjelasan di atas telah menggambarkan perpecahan diantara rakyat Indonesia dalam memperjuangkan revolusi Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Perpecahan yang terjadi antara pemerintah, yang menerapkan cara diplomasi yang dimotori oleh Soekarno-

¹ Masykur Arif Rahman. *Tan Malaka, Pahlawan Besar Yang Dilupakan Sejarah*. (Yogyakarta: Palapa, 2013). hlm. 232.

² Abraham Ali Fakhri. *Dari Penjara Ke Penjara. Studi Komprehensif atas Perjalanan Hidup, Perjuangan, Dan Pemikiran Emas Tan Malaka Dalam Konteks Keindonesiaan*. (Yogyakarta: Palapa, 2015). hlm. 229.

³ Masykur Arif Rahman. *Op. cit.* hlm. 236.

Hatta dan Sutan Syahrir, dengan organisasi Persatuan Perjuangan yang menghendaki perjuangan secara terang-terangan. Meskipun hanya bertahan beberapa bulan, Persatuan Perjuangan banyak memiliki peran terhadap jalannya Revolusi Indonesia meskipun menjadi organisasi oposisi pemerintah Indonesia. Dalam penelitian ini penulis akan mencoba mengungkap *Peran Persatuan Perjuangan Dalam Revolusi Indonesia Tahun 1946*.

METODE

Sejarah merupakan sebuah peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang hanya mampu direkonstruksi melalui benda-benda peninggalan sejarah. Sumber sejarah berupa benda-benda peninggalan sejarah dapat mengungkapkan sebuah fakta yang terjadi dimasa lampau. Sebab dasar penggunaan sumber sejarah ialah keinginan untuk mencari kebenaran suatu peristiwa yang telah terjadi.⁴ Pengungkapan sumber-sumber sejarah dibutuhkan sebuah metode yang mampu merekonstruksi peristiwa sejarah secara utuh. Penelitian mengenai peranan Persatoean Perdjoengan terhadap kondisi politik di Indonesia antara tahun 1945 sampai 1950 menggunakan metode sejarah. Metode sejarah merupakan seperangkat prosedur, alat atau piranti yang digunakan sejarawan dalam menyusun penelitian sejarah. Metode sejarah mempunyai empat langkah proses penelitian yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.⁵

1. Heuristik

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian sejarah adalah heuristik. Heuristik adalah proses mencari dan mengumpulkan sumber atau data. Sumber ataupun data yang diperoleh tentunya meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang diperoleh pada kurun waktu yang sejaman dengan terjadinya peristiwa sejarah atau kesaksian orang dengan panca indra terhadap peristiwa sejarah tersebut. Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah berupa koran dan surat kabar yang terbit antara periode tahun 1946. Koran dan surat kabar yang asli yang membahas tentang Persatuan Perjuangan pada tahun 1946 ini sekarang menjadi salah satu koleksi di Perpustakaan Nasional. Berbagai sumber primer yang dikeluarkan pada tahun 1946 yang menjelaskan tentang pergerakan dari organisasi serta peranan dan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh Persatoean Perdjoengan dalam menanggapi berbagai permasalahan yang terjadi selama revolusi Indonesia. Adapun beberapa koran dan surat kabar yang digunakan sebagai sumber primer yaitu *Berita Indonesia*, *Boelan sabit*, *Boeroeh*, *Kedaulatan Rakjat*, *surat kabar Merdeka*, *Soeara Rakjat*, *Soerat kabar*

Berdjoeng dan *Surat Kabar Penghela Rakjat*.

Sebagai bahan pendukung dari sumber primer, juga diperlukan studi pustaka dengan membaca buku yang memiliki keterkaitan dengan topik permasalahan yang disebut dengan sumber sekunder. Sumber sekunder adalah sumber yang diperoleh dari peristiwa sejarah berlangsung. Studi pustaka ini dilakukan dengan mencari sumber sekunder di Perpustakaan Nasional Indonesia, Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya, dan juga beberapa referensi yang bersumber dari dosen Universitas Negeri Surabaya. Adapun sumber pendukung seperti buku-buku yang tidak sejaman namun dapat dijadikan acuan.

2. Kritik

Pada tahap kritik sumber, penulis melakukan kritik dan verifikasi dengan tujuan untuk menguji validitas dan kebenaran sumber-sumber yang telah diperoleh dalam upaya penulisan peran Persatoean Perdjoengan dalam Revolusi Indonesia. Penulis melakukan kritik intern terhadap sumber-sumber yang ditemukan untuk membuktikan bahwa kesaksian yang diberikan suatu sumber memang benar dan dapat dipercaya.

3. Interpretasi

Pada tahap ini penulis melakukan penafsiran terhadap fakta-fakta yang telah diperoleh dan dirangkai sehingga menjadi satu kesatuan tulisan yang utuh dan logis. Pada tahap ini penulis akan mencari hubungan antar sumber yang sudah dikritik untuk kemudian ditafsirkan menjadi sebuah fakta.

4. Historiografi

Pada tahap ini penulis melakukan penelitian berdasarkan kerangka berfikir dan fakta-fakta yang sebelumnya telah diperoleh. Berbagai fakta dan sumber yang telah diperoleh dirangkai secara sistematis dan kronologis sehingga menjadi sebuah tulisan sejarah yang metodologis.

PEMBAHASAN

A. SITUASI POLITIK INDONESIA MASA AWAL REVOLUSI

Sehari setelah proklamasi Indonesia, pembentukan pemerintahan Indonesia berlangsung dengan cepat. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memilih Ir. Soekarno dan Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang pertama dan membentuk satu komisi bersama Prof. Soepomo, Otto Iskandar Dinata, Mr. M. Yamin, dan Mr. Wongsonegoro untuk mengadakan perubahan terakhir

⁴Aminuddin Kasdi. *Memahami Sejarah*. (Surabaya : Unesa University Press, 2005). hlm. 13.

⁵*Ibid*. hlm. 10.

UUD.⁶ Pemerintahan Presidensial tersebut kemudian mengumumkan susunan kabinetnya tanggal 19 Agustus 1945.

Pada masa awal revolusi Indonesia ini, lembaga perwakilan rakyat diperankan oleh Komite Nasional Indonesia (KNI) pada tingkat pusat menjadi KNI pusat. Pembentukan KNIP ini diprakarsai oleh PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 dan berfungsi sebagai “perwujudan kebulatan tujuan dan cita-cita rakyat Indonesia untuk dapat menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat”. Pada tanggal 29 Agustus 1945, Presiden secara resmi melantik Kasman Singodimedjo sebagai ketua Komite Nasional Indonesia Pusat. Selain membentuk KNIP, Pemerintah juga membentuk Komite-komite Nasional Daerah seluruh Indonesia untuk menjalankan tugas-tugas.

Ditunjuknya Sjahrir sebagai ketua KNIP yang baru membawa perubahan dalam tubuh KNIP dan pemerintahan yang menunjukkan sebagai cerminan aspirasi rakyat Indonesia pada saat itu. perubahan pertama adalah dijadikannya KNIP sebagai badan legislatif, serta ditetapkannya Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X yang berisikan:

1. Sebelum MPR-DPR terbentuk, KNIP disertai kekuasaan legislatif dan ikut serta menetapkan garis-garis besar mengenai haluan Negara.
2. Berhubungan dengan keadaan yang sedang genting, banyak anggota dari KNIP diperlukan di daerah-daerah, maka pekerjaan sehari-hari KNIP dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja (BP).⁷

Perubahan status KNIP ini ditujukan untuk memperkuat kedudukan pemerintah Indonesia untuk menghadapi pihak asing yang menganut paham demokrasi, karena Indonesia pada saat masa awal revolusi di cap sebagai negara fasis bentukan Jepang apabila kekuasaan Presiden terlalu besar. Usaha kedua yang dijalankan KNIP ialah mendirikan partai-partai politik. Dengan perubahan status KNIP, maka Indonesia menjadi sebuah negara yang mengikuti pola parelemen Eropa Barat. Konsekuensinya, suara rakyat Indonesia harus disalurkan melalui organisasi-organisasi politik. KNIP dibawah Sutan Sjahrir menjelaskan bahwa kelak pemilihan itu akan bersifat demokratis, dan oleh karena itu keikutsertaan partai-partai politik merupakan hal yang utama. Pada tanggal 11 November 1945, Badan Pekerja KNIP mengusulkan penyesuaian sistem kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden. Pada tanggal 14 November dikeluarkanlah Maklumat Pemerintah, yang berisi disetujuinya perubahan sistem kabinet dari presidensial menjadi parlementer. Sjahrir ditunjuk sebagai formatur

kabinet dan segera mebuat Kabinet Sjahrir I.⁸ Sjahrir dianggap sebagai tokoh yang sesuai dengan situasi politik saat itu karena dianggap oleh pemerintah pusat dapat menghadapi diplomasi dengan negara Barat.

Perundingan pertama dilakukan pada tanggal 17 November 1945, dan menghasilkan usulan-usulan dari pihak Belanda yang intinya berisi mengenai stabilitas keamanan di Indonesia. Namun akhirnya perundingan ini tidak menghasilkan apapun, karena Perdana Menteri Sjahrir tidak sempat memberikan jawaban dari usulan-usulan yang diajukan oleh Belanda dengan alasan sibuk untuk mengadakan rapat dengan KNIP. Perundingan yang kedua dilakukan pada tanggal 10 Februari 1946, yang menghasilkan usulan politik pemerintah Belanda, bahwa Negara Indonesia akan menjadi negara persemakmuran di bawah Kerajaan Belanda.⁹ Dalam perundingan ini Perdana Menteri Sjahrir juga mengalami kegagalan, karena sebelum memberikan jawaban kabinet Sjahrir jatuh karena dianggap tidak berhasil mewujudkan keinginan rakyat Indonesia.

B. SEJARAH TERBENTUKNYA PERSATUAN PERJUANGAN

1. Latar belakang berdirinya Persatuan Perjuangan

Tan malaka menanggapi langkah Perdana Menteri Sutan Syahrir yang melakukan jalan diplomasi dalam menghadapi Belanda dan sekutunya, Tan Malaka berkesimpulan bahwa jalan diplomasi yang dijalankan pemerintah tidak sesuai dengan kemauan rakyat Indonesia pada saat itu, karena cara diplomasi baru bisa dilakukan ketika Belanda dan sekutunya sudah angkat kaki dari Indonesia. sikap politik Tan Malaka ini menunjukkan bahwa Tan Malaka ingin tetap fokus pada persatuan gerakan revolusi untuk berjuang melawan Belanda dan sekutu yang datang menyerang dan menguasai Indonesia yang baru saja meraih kemerdekaannya.

Agar apa yang di cita-citakan tercapai, Tan Malaka yang mempunyai pengaruh kuat di akar rakyat revolusioner, dengan dibantu oleh beberapa kaum pemuda Tan Malaka merealisasikan cita-citanya dengan mengundang beberapa para pemimpin organisasi politik, sosial, keagamaan, kelaskaran, dan ketentaraan dalam sebuah rapat besar. Tan Malaka menginginkan semua partai, badan, tentara, dan laskar yang saling berseberangan dan terpecah-pecah untuk bersatu dalam satu organisasi, satu program, satu tujuan, dan satu kepentingan. Tan Malaka juga berkeinginan bahwa perbedaan pandangan harus segera dihilangkan, dan persatuan pandangan harus bica segera dicapai dengan didirikannya organisasi Persatuan Perjuangan.

Satu organisasi, satu program, satu tujuan, dan satu kepentingan itu ialah melawan Tentara Inggris. Konon, Gemeene-best dan Rijksverband Van Mook serta pidato Wilhelmina pada bulan Desember 1942 untuk mengadakan diplomasi busuk dengan Kabinet Soekarno-Hatta yang sudah kontra-revolusi dan ketakutan karena

⁶George Mc Turnan Kahin. *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. (Jakarta: UNS Press, 1995) hlm. 175.

⁷Drs. Susanto tirtoprodjo. *Op. cit.* hlm. 60.

⁸ Soebadio. *Op. cit.* hlm. 98.

⁹ George Mc Turnan Kahin. *Op. cit.* hlm 238.

dituduh war criminal. Disisi lain dibentuknya Persatuan Perjuangan karena adanya ketidaksepahaman dengan cara diplomasi yang dilakukan pemerintah pusat yang juga dilandasi oleh peristiwa rakyat Indonesia yang sangat gigih dalam melakukan pertempuran menghadapi Belanda dan sekutunya diberbagai daerah, seperti di Medan, pertempuran lima hari di Kota Semarang, di Kota Bandung dan utamanya pertempuran rakyat di Surabaya yang oleh Presiden Soekarno dianggap sebagai pertempuran yang paling dahsyat selama masa revolusi Indonesia.¹⁰

2. Berdirinya Persatuan Perjuangan

Pada tanggal 3 sampai 5 Januari 1946 di Gedung serba guna Purwokerto, berhasil diadakan kongres pertama Persatuan Perjuangan. Kongres ini diadakan dengan tujuan untuk membahas permasalahan tentang keinginan perjuangan rakyat Indonesia.¹¹ Semua peserta yang hadir secara resmi mendapat undangan pribadi dari panitia penyelenggara kongres.

Kongres pertama ini dihadiri oleh 132 organisasi, baik dari organisasi sipil, partai, laskar, dan ketentaraan. Para peserta yang hadir antara lain para pimpinan pusat partai Sosialis, Partai Komunis Indonesia, Serikat Buruh Indonesia, Partai Masyumi, Partai Buruh Indonesia, Partai Revolusioner Indonesia, serta organisasi-organisasi pemuda dan pejuang dari Pesindo, Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia, Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia, Hizbullah, Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPPI), Angkatan Muda Republik Indonesia, Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi, Pemuda Republik Indonesia Sumatera, dan Federasi Perempuan Persatuan Wanita Indonesia (Perwari), dan juga berasal dari kalangan tentara. Para peserta yang hadir mewakili seluruh lapisan rakyat Indonesia, termasuk yang hadir adalah Tan Malaka dan Jenderal Besar Soedirman yang mendukung gerakan untuk merdeka secara penuh dengan cara Persatuan Perjuangan.¹²

Menurut Tan Malaka jika menginginkan sebuah persatuan dan tercapainya tujuan rakyat Indonesia untuk melawan Belanda dan sekutunya, perlunya Volksfront serta Minimum Program yang mana nantinya mengakui kemerdekaan Indonesia 100% dan kelak Volksfrontwaqe dengan Minimum Programnya akan dibahas pada sidang kedua Persatuan Perjuangan. Tan Malaka menjelaskan mengenai rencana pembentukan Volksfront dan Minimum Program. Pada tanggal 15-16 Januari bertempat di bekas gedung Balai Agung Solo, dilangsungkan kongres Persatuan Perjuangan sebagai lanjutan rapat Volksfront di Purwokerto. Pada kongres kedua ini

mendapatkan perhatian rakyat yang sangat besar, ini dibuktikan dengan kedatangan utusan-utusan partai-partai revolusioner Indonesia yang berjumlah kurang lebih 500 orang yang mewakili 141 organisasi.¹³

Hasil Minimum Program Persatuan Perjuangan yang berisi tujuh pasal yang sebelumnya diajukan akhirnya disetujui oleh peserta kongres dan anggota panitia dengan dilakukan sedikit perbaikan pada tujuh minimum program. Sebagai hasil dari kongres kedua Persatuan Perjuangan ini telah diputuskan dan disepakati minimum program dari organisasi Persatuan Perjuangan yang berjumlah tujuh butir, adalah :

1. Berunding atas pengakuan kemerdekaan 100%.
2. Pemerintah Rakyat (dalam arti sesuainya haluan pemerintah dengan kemauan rakyat).
3. Tentara rakyat (dalam arti sesuainya haluan tentara dengan kemauan rakyat).
4. Melucuti tentara Jepang.
5. Mengurus tawanan bangsa Eropa.
6. Menyita (membeslag, confiscate) dan menyelenggarakan pertanian musuh (perkebunan).
7. Menyita (membeslag) dan menyelenggarakan perindustrian musuh (pabrik, bengkel, tambang, dan lain-lain).¹⁴

Kemudian dikabarkan bahwa Volksfront berganti nama menjadi Persatuan Perjuangan. Demikianlah terbentuknya Persatuan Perjuangan mendapatkan sambutan yang baik dari sebageian besar rakyat Indonesia dan dari BPKNIP. Dengan adanya Persatuan Perjuangan, terdapat dua kekuatan perjuangan dalam revolusi Indonesia yang mempunyai cara perjuangan yang berbeda. Pemerintah pusat di bawah Presiden Soekarno-Hatta dan Perdana Menteri Sjahrir yang menggunakan diplomasi sebagai cara berjuangnya dan organisasi Persatuan Perjuangan yang tanpa kompromi, tanpa menggunakan cara diplomasi dan menggunakan perjuangan yang bersifat langsung secara berperang.

C. PERAN PERSATUAN PERJUANGAN DALAM REVOLUSI INDONESIA

Kongres Persatuan Perjuangan yang ketiga di Solo tanggal 27 Januari 1946, merupakan titik awal peran politik dari Persatuan Perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia secara utuh dari Belanda dan Sekutunya. Persatuan Perjuangan merasa harus ikut serta demi keselamatan Indonesia, karena Persatuan Perjuangan dilahirkan untuk memperkuat perjuangan Indonesia dan akan terus berjuang sampai terwujudnya kemerdekaan Indonesia 100% dan dengan demikian dunia Internasional akan mengakui bahwa rakyat Indonesia benar-benar sudah merdeka dan tidak akan dijajah kembali oleh musuh.

Persatuan Perjuangan membuktikan dengan peran nyata tidak akan mencari kedudukan dalam kabinet

¹⁰ Cindy Adams. *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat*. (Jakarta: Gunung Agung, 1963). hlm. 343.

¹¹ Harry A. Poeze. *Tan Malaka, Gerakan Kiri, Dan Revolusi Indonesia Jilid I*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008). hlm. 207.

¹² *Ibid.* hlm. 208.

¹³ "Persatoean Perdjoengan Rakjat lahir". Kedaulatan Rakjat, 16 Januari 1946.

¹⁴ *ibid.* Kedaulatan Rakjat, 16 Januari 1946.

pemerintah Indonesia, Persatuan Perjuangan juga mempunyai gagasan yang tegas merdeka 100% dan Minimum Program, hal ini untuk menghindari kesalahpahaman diantara kalangan rakyat Indonesia yang berfikir bahwa Persatuan Perjuangan didirikan hanya untuk melemahkan persatuan serta perjuangan rakyat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya dan akan menimbulkan perpecahan di dalam negeri. Apabila ada yang mengatakan bahwa Persatuan Perjuangan akan melemahkan perjuangan rakyat Indonesia dan akan membawa masalah baru, Persatuan Perjuangan dengan tegas menjawab orang itu sendiri yang berniat merusak peran dan tujuan Persatuan Perjuangan untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Karena di dalam Persatuan Perjuangan jelas nyata terdapat berbagai partai dan organisasi-organisasi besar yang sudah bergabung dan bersatu untuk memperjuangkan nusa dan bangsanya.

1. Memperkuat Persatuan

Kepedulian Persatuan Perjuangan terhadap kondisi di berbagai daerah di Indonesia terlihat jelas pada kongres Persatuan Perjuangan yang diselenggarakan di Solo, dimana Persatuan Perjuangan membahas keadaan yang terjadi di Jawa Barat yang sedang mengalami kekacauan akibat kedatangan Belanda dan Sekutunya. Persatuan Perjuangan beranggapan bahwa jika kondisi ini akan dibiarkan maka kekacauan akan menyebar ke berbagai daerah lainnya seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur, oleh karena itu Belanda dan Sekutunya harus segera dilawan.

Keadaan yang tidak stabil ini menimbulkan keinginan yang kuat dari Persatuan Perjuangan untuk terus melawan dan mempertahankan hak-hak dan kehormatan bangsa Indonesia dari Belanda dan Sekutu. Persatuan Perjuangan menyerukan agar berontak secara serentak melawan Belanda dan Sekutu dengan dibantu oleh para anggota dan rakyat Indonesia yang berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Persatuan Perjuangan mengambil sikap untuk memerintahkan para anggotanya dan sebagian besar rakyat Indonesia agar memperkokoh persatuan antara pemerintah pusat dengan rakyat Indonesia. Kedua, Persatuan Perjuangan memerintahkan agar terjalinnya koordinasi militer lebih diperkuat lagi untuk mengantisipasi serangan yang akan dilakukan oleh Belanda dan Sekutunya. Ketiga, Persatuan Perjuangan memerintahkan agar blokade ekonomi juga diperkuat agar keadaan ekonomi tidak semakin memburuk karena lambannya sikap pemerintah pusat dalam menanggapi permasalahan ini.¹⁵

2. Berunding dengan Pemerintah

Pada kongres Persatuan Perjuangan di Solo tanggal 15 Januari 1946, Persatuan Perjuangan memutuskan untuk mengirimkan delegasi yang merupakan wakil anggota yang dipilih untuk melakukan perundingan dengan pemerintah pusat dibawah Perdana Menteri

Sjahrir secara terang-terangan. Dalam perundingan dengan pemerintah, delegasi akan membahas tentang resolusi yang telah diambil pada kongres Persatuan Perjuangan. Adapun bunyi dari resolusi yang dirundingkan adalah sebagai berikut:

Rakyat Indonesia bersidang tanggal 15 Januari dan 16 Januari di kota Solo dengan pembentukan permusyawaratan pembentukan Persatuan Perjuangan yang dihadiri oleh para wakil-wakil susunan-susunan politik ekonomi, sosial, dan ketenteraman terdiri dari 141 perhimpunan mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk terus bekerja bersama-sama melaksanakan program yang telah diputuskan oleh organisasi Persatuan Perjuangan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Berunding atas pengakuan kemerdekaan 100%.
2. Pemerintah dan rakyat (dalam artian ini adalah haluan pemerintah dengan kemauan rakyat).
3. Tentara rakyat (dalam artian ini adalah haluan tentara dengan kemauan rakyat).
4. Melucuti tentara Jepang.
5. Mengurus tawanan bangsa Eropa.
6. Menyita dan menyelenggarakan pertanian musuh (perkebunan).
7. Menyita dan menyelenggarakan perindustrian musuh (pabrik bengkel, tambang dan lain-lain).¹⁶

Dalam perundingan ini delegasi dari Persatuan Perjuangan diwakili oleh wakil anggota yang berasal dari Organisasi Pemberontakan Rakyat Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Pesindo, Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia, Masyumi, dan Perwari. Perundingan dengan pemerintah ini diselenggarakan di Yogyakarta dan Persatuan Perjuangan meminta kepada pemerintah pusat agar hasil dari perundingan dipublikasikan dengan sebaik-baiknya.

Persatuan Perjuangan berharap dengan dikirimkannya delegasi untuk berunding dengan pemerintah pusat, akan memberikan kabar baik untuk seluruh rakyat Indonesia sehubungan dengan diterimanya Minimum Program yang merupakan suatu persatuan yang kuat antara pemerintah dengan rakyat. Persatuan antara rakyat dengan rakyat dan persatuan antara rakyat dengan pemerintahlah yang akan membawa Indonesia kejalan yang lebih baik sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi jika pemerintah pusat tidak segera menanggapi delegasi yang dikirimkan oleh Persatuan Perjuangan, maka akan berakibat semakin sengsaranya rakyat yang ditindas oleh Belanda dan sekutunya.

Rakyat Indonesia menginginkan agar kesemua tujuh butir Minimum Program Persatuan Perjuangan

¹⁵ "Secretariat Persatoean Perdjoeangan Dibentoe". Kedaulatan Rakjat, 28 Januari 1946.

¹⁶ "Persatoean Perdjoeangan Mengirimkan Delegasi Kepada Pemerintah Repoeblik Indonesia". Penghela Rakjat, 30 Januari 1946.

diterima oleh pemerintah pusat. Pertama, rakyat ingin segera menyita hak milik perkebunan, perusahaan, pabrik-pabrik yang dimiliki oleh musuh, karena inilah yang menjadi jiwa kaum buruh, jiwa kaum proletar atau petani yang nantinya akan berjuang dengan seluruh jiwa dan raganya melawan serbuan kaum penjajah. Kedua, menyita secara terang-terangan, hal ini dikarenakan agar musuh mengetahui bahwa adanya kekuatan nyata yang dimiliki oleh kaum buruh, kaum proletar, dan petani. Ketiga, menyita hak-hak yang dimiliki musuh, karena musuhlah yang secara nyata memerangi rakyat dan mengumandangkan peperangan. Keempat, menyita persenjataan musuh, karena banyak korban dari rakyat Indonesia tewas dengan senjata modern musuh, serta banyaknya gedung dan bangunan yang hancur dan masyarakat yang dibuat sengsara. Kelima, menyita dengan terang-terangan, agar dunia Internasional mengetahui bahwa kerusakan disebabkan oleh Belanda dan sekutunya dan mengetahui bahwa Belanda dan sekutunya datang ke Indonesia adalah untuk memerangi rakyat Indonesia yang membela dan berperang demi kemerdekaan negaranya. Keenam, sekali lagi menyita milik musuh, adalah hak rakyat Indonesia yang ditindas dan diperangi oleh Belanda dan sekutunya, oleh karena itu rakyat Indonesia berhak menyita semua yang dimiliki oleh musuh.¹⁷

3. Aksi Massa

Tepat pada tanggal 17 Februari 1946, bertepatan dengan peringatan enam bulan berdirinya negara Indonesia, Persatuan Perjuangan bersama-sama dengan seluruh anggota kongres yang berjumlah 137 organisasi menetapkan untuk melakukan “*Demonstrasi secara besar-besaran*” di seluruh Indonesia, aksi ini merupakan wujud dari rasa kekecewaan Persatuan Perjuangan terhadap perundingan yang dilakukan dengan pemerintah, aksi ini juga bertujuan untuk menuntut kemerdekaan 100% dan untuk memperbarui tekad dan penetapan hati agar segera terlaksananya Minimum Program Persatuan Perjuangan. Demonstrasi massa yang dilaksanakan merupakan gambaran umum segala lapisan masyarakat dan pemuda Indonesia yang secara keras menuntut terlaksananya:

1. Isi Minimum Program (7 Pasal).
2. Penarikan Tentara Inggris-NICA dari Indonesia.
3. Lenyapnya Pengadilan dan Polisi Internasional dari Indonesia.
4. Kembalinya Pemuda dan Gadis Indonesia yang ditawan oleh Belanda dan Inggris.
5. Membatalkan perundingan dengan Kerr dan Van Mook, sebelum syarat-syarat atas pengakuan Indonesia Merdeka 100% (secara Internasional) diperoleh.¹⁸

Persatuan Perjuangan melalui demonstrasi tersebut kembali menegaskan isi dari Minimum Program agar dapat lebih dipahami dan dimiliki oleh rakyat Indonesia sebagai pedoman dalam jiwa perjuangan dan tuntutan mengenai kemerdekaan Indonesia yang tidak dapat lagi diganggu gugat dan dikurangi.¹⁹

Inti dari rumusan demonstrasi yang diserukan oleh Persatuan Perjuangan adalah agar lebih mengutamakan konfrontasi dengan Belanda dan Sekutunya, dan memperoleh kemerdekaan secara utuh dengan perjuangan rakyat Indonesia sendiri. Persatuan Perjuangan lebih mengutamakan perlawanan secara fisik dan revolusi seutuhnya, tindakan yang lebih merupakan perlawanan terhadap Belanda dan sekutunya daripada harus bertindak secara diplomasi sementara disisi lain rakyat Indonesia terus ditindas oleh pihak musuh.

4. Oposisi terhadap Pemerintah

Pembentukan Kabinet Sjahrir yang kedua pada tanggal 2 Maret 1946 menimbulkan reaksi dan komentar dari Persatuan Perjuangan, menurut Persatuan Perjuangan susunan daftar Kabinet Sjahrir belum mewujudkan koalisi yang diharapkan. Meskipun di dalam susunan kabinet terdiri dari 3 organisasi besar, akan tetapi Partai Sosialis masih saja mendominasi kabinet yang kedua ini, selain itu banyaknya susunan kabinet yang berasal dari tokoh-tokoh non-partai.

Tokoh politik Soebardjo yang sejalan dengan Persatuan Perjuangan, mengatakan bahwa pembentukan kabinet baru oleh Perdana Menteri Sjahrir ini justru lebih mengutamakan sifat dan kecakapan dari menteri-menteri yang ditujukannya. Perdana Menteri Sjahrir juga memperhitungkan bentuk koalisi kabinet tersebut, anggota kabinet selain dari Partai Sosialis, Masyumi, dan PNI serta wakil kaum pemuda. Namun dibalik itu semua ada tujuan tersembunyi dari kabinet koalisi yang baru, yakni untuk mempersempit dan memecah kekuatan Persatuan Perjuangan dari dalam organisasinya karena sikap yang tidak mau sejalan dengan pemerintah pusat.²⁰

Mengetahui bahwa Minimum Program yang ditawarkan pada pemerintah ditolak, Persatuan Perjuangan dalam rapat anggota pada tanggal 1 Maret 1946 memberikan intruksi pada semua anggota dari organisasi-organisasi yang tergabung dalam Persatuan Perjuangan untuk tidak masuk dalam kabinet baru, hal ini karena kabinet yang baru tidak menjalankan Minimum Program Persatuan Perjuangan dan Persatuan Perjuangan juga akan memberikan tuntutan kepada pemerintah jika tidak sanggup membentuk kabinet yang menjalankan Minimum Program maka Persatuan Perjuangan sanggup untuk membentuk pemerintah yang baru. Intruksi ini diumumkan langsung oleh Wikana selaku wakil dari Persatuan Perjuangan dan sidang Persatuan Perjuangan

¹⁷ “*Program Rakjat Jang Berdjoeang*”. Kedaulatan Rakjat, 7 Februari 1946.

¹⁸ “*Aksi Oemoetan Toentoetan Kemerdekaan 100%*”. Kedaulatan Rakjat, 15 Februari 1946.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ “*Kabinet Baroe*”. Penghela Rakjat, 13 Maret 1946.

tanggal 4 Maret digedung KNI Solo memperkuat kembali putusan tersebut.²¹

Pertentangan dengan pemerintah pusat yang menganggap kehadiran Persatuan Perjuangan menghalangi usaha pemerintah untuk berunding dengan Belanda dan Sekutunya, mengakibatkan kekuatan Persatuan Perjuangan mengalami kemunduran yang sangat drastis. Disisi lain, dengan adanya Persatuan Perjuangan justru memberikan kekuatan penyeimbang dengan pemerintah, artinya bukan untuk menjadi pesaing ataupun merusak kedaulatan Bangsa Indonesia, tetapi untuk mewujudkan cita-cita rakyat Indonesia yang menginginkan kemerdekaan secara utuh 100%.

D. Kemunduran Persatuan Perjuangan

Kemunduran organisasi Persatuan Perjuangan sudah mulai terlihat ketika Sutan Sjahrir diangkat kembali menjadi Perdana Menteri pada tanggal 1 Maret 1946 dan usulan untuk menjadikan Minimum Program Persatuan Perjuangan sebagai program pemerintah ditolak oleh Presiden Soekarno-Hatta. Menurut para tokoh pemerintah pusat, Minimum Program dianggap program yang terlalu radikal sementara itu tokoh politik Persatuan Perjuangan tetap bersikukuh pada pendiriannya. Tan Malaka beranggapan bahwa program yang akan dijalankan pemerintah pusat tidak jelas dan pemahamannya masih terlalu luas, akan tetapi reaksi-reaksi yang dikeluarkan oleh Tan Malaka dan Persatuan Perjuangan tidak diperdulikan oleh pemerintah pusat.

Pemerintah pusat dibawah Presiden Soekarno-Hatta dan Perdana Menteri Sjahrir tetap menjalankan kelima program yang telah dibentuk dan disepakati, salah satunya tetap melakukan politik diplomasi untuk menghadapi Belanda dan sekutunya sebagai langkah awal dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam kabinet Sjahrir yang kedua ini untuk menghindari hal-hal yang menghalangi terwujudnya kelima program pemerintah, Sutan Sjahrir mengambil kebijakan untuk memperkecil kekuatan Persatuan Perjuangan.

Perdana Menteri Sjahrir ketika kembali menjalankan politik diplomasinya, pada saat itu pula Belanda juga mengajukan usulan mengenai pembentukan negara Indonesia yang merdeka dengan berbentuk federasi dalam suatu Uni dengan Belanda. Menanggapi usulan tersebut, Perdana Menteri Sjahrir meminta kepada Belanda untuk memberikan pengakuan secara de facto atas kekuasaan Indonesia di Jawa, Madura, Sumatera sebagai balas jasa kosensi dalam hal Negara Federasi dan keikutsertaannya dalam Uni.²²

Kebijakan yang diambil oleh Perdana Menteri Sjahrir ini pada prinsipnya bertentangan dengan kelima program pemerintah yang telah dibentuk dan disetujui, apalagi dengan Minimum Program Persatuan Perjuangan. Karena itu, Perdana Menteri Sjahrir menyadari resiko yang akan dihadapinya ketika mengambil kebijakan tersebut, Perdana Menteri Sjahrir mengambil langkah-

langkah untuk menyingkirkan Persatuan Perjuangan yang sudah jelas akan menjadi penghambat dalam menjalankan politiknya.

Pada tanggal 13 Maret 1946, Perdana Menteri Sjahrir mengirimkan sebuah surat rahasia yang dikirimkan ke Yogyakarta, surat rahasia tersebut berisikan perintah penangkapan terhadap para tokoh pemimpin Persatuan Perjuangan. Hal ini juga diakui oleh Soebadio karena dialah yang bertugas mengirimkan surat perintah penangkapan tersebut, menurutnya perintah itu tidak berbentuk tulisan melainkan berbentuk lisan.²³ Menurut Moh. Yamin, penangkapan tersebut ada kaitannya dengan pihak Belanda dan sekutunya yang tetap menginginkan politik diplomasi. Pada hari Minggu malam tanggal 17 Maret 1946, setelah kongres Persatuan Perjuangan di Madiun selesai, Tan Malaka (Promotor Persatuan Perjuangan) dan Soekarni (Sekretaris Persatuan Perjuangan) ditangkap oleh beberapa orang di Madiun, penangkapan tersebut menurut keterangan yang ada dilakukan atas perintah dari Pemerintah Tinggi, penangkapan tersebut berdasarkan izin dari Residen Madiun. Selain kedua tokoh tersebut masih ada Abikusno, Mohammad Yamin, Sukarni, dan Chaerul Shaleh dan Sayuti Melik yang ditangkap dan dibawa ke Yogyakarta untuk diperiksa.²⁴ Ketika terjadi peristiwa penangkapan, beberapa anggota Persatuan Perjuangan yang berada di Yogyakarta menanyakan mengenai penangkapan tersebut kepada MTTRI dan juga kepada Presiden Indonesia, akan tetapi menurut mereka, pemerintah tidak tahu tentang peristiwa penangkapan tersebut. Pemerintah seolah-olah menutupi peristiwa tersebut dan berpura-pura untuk segera mengurus peristiwa tersebut dengan alasan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan.

Penangkapan yang dilakukan terhadap tokoh politik Persatuan Perjuangan, dalam rapatnya di Yogyakarta tanggal 5 April 1946 ini dipimpin oleh S. Mangoensarkono dan dihadiri oleh anggota-anggota yang masih tergabung dalam Persatuan Perjuangan antara lain, PB. Masyumi, PP. GPII, MB. PKI, PB. PNI, PB. Perwari, Barisan Rakyat, PB. Buruh Dewan LGI, Dewan Perjuangan Jawa Barat, dan Markas Besar Barisan Banteng menghasilkan mosi rapat yang ditujukan kepada Presiden Soekarno-Hatta, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung dan Pers sebagai berikut:

1. Sesudah membaca pengumuman dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, dan Jaksa Agung mengenai penangkapan para pemimpin dalam beberapa hari yang lalu.
2. Mengingat bahwa menurut pasal 2 dari pengumuman itu, bahwa penangkapan tersebut didasarkan kepada oposisi yang bersifat tidak mendukung pemerintah dan semata-mata ditujukan untuk melemahkan kedudukan pemerintah dengan tuduhan

²¹ "Politik Kabinet Baroe". Penghela Rakjat, 6 Maret 1946.

²² G. Moejanto. *Op. cit.* hlm. 162.

²³ Soebadio Sastrosatomo. *Perjuangan Revolusi*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987). hlm. 56.

²⁴ "Tan Malaka dan Soekarni Ditangkap". Kedaulatan Rakjat, 20 Maret 1946.

yang tidak bertanggung jawab, seperti yang sudah terbukti pada ksisis kabinet yang baru.

3. Berpendapat, bahwa berdasarkan pemerintah penangkapan tersebut pertama-tama dihubungkan dengan alasan krisis kabinet yang baru, akan tetapi alasan itu tidak sesuai dengan pendirian Persatuan Perjuangan. Karena pada saat itu, Persatuan Perjuangan menyatakan kepada Presiden Soekarno sanggup untuk membentuk kabinet dengan berdasarkan Minimum Program yang menurut aturan politik diperbolehkan dalam Negara yang berdasarkan Kedaulatan Rakyat.

Memutuskan:

1. Meminta keterangan yang lebih jelas kepada pemerintah pusat, apakah penangkapan tersebut benar-benar dilakukan dan dihubungkan dengan sikap Persatuan Perjuangan terhadap krisis kabinet yang terjadi dan kedudukan Persatuan Perjuangan sebagai oposisi pemerintah.
2. Menjelaskan bahwa, ketika Persatuan Perjuangan mengadakan keputusannya tentang krisis kabinet itu, Tan Malaka sebagai Promotor Persatuan Perjuangan tidak ikut hadir dan tentu saja tidak ikut memutuskan kebijakan tersebut.
3. Berhubungan dengan bukti-bukti yang sudah ada dalam pasal 3 yang berbunyi: Selain dari pada itu didalam tangan pemerintah ada bukti-bukti yang menunjukkan, bahwa tindakan beberapa pemimpin Persatuan Perjuangan tadi ditujukan kepada usaha untuk merubah susunan pemerintah pusat dengan jalan diluar garis Undang-Undang Negara, karena itu segera mengeluarkan keputusan untuk rakyat Indonesia dan pihak Persatuan Perjuangan mengenai bagaimana keadaan yang sebenarnya.
4. Persatuan Perjuangan selalu bersedia melakukan perundingan dengan pemerintah pusat agar penyelesaian peristiwa penangkapan ini segera terselesaikan. Sehingga dapat menjawab kegelisahan yang dialami rakyat kita dalam masa perjuangan ini.²⁵

Dalam rapat yang dipimpin oleh S. Mangoensarkono itu berjalan sengat alot dan sebagian besar anggota rapat menginginkan agar Persatuan Perjuangan dibubarkan, dan kemudian mendirikan badan

lain untuk menggantikan Persatuan Perjuangan. Peristiwa penangkapan toko-toko penting dan paling berpengaruh dalam Persatuan Perjuangan memang memberikan dampak yang sangat berat bagi kelangsungan organisasi ini. Organisasi-organisasi yang semula berasal dari berbagai kalangan bersatu dan saling bekerjasama dalam sebuah wadah organisasi Persatuan Perjuangan, akhirnya tercerai-berai dan peranan Persatuan Perjuangan dalam mewujudkan revolusi Indonesia yang merdeka semakin berkurang dan praktis Persatuan Perjuangan telah sampai titik akhir perjuangannya.

Akhirnya dalam rapat Persatuan Perjuangan pada tanggal 4 Juni 1946 di Yogyakarta, memutuskan bahwa Persatuan Perjuangan berusaha untuk memperluas lingkungan persatuan dan pemusatan tenaga nasional dengan mendirikan Konsentrasi Nasional pada tanggal 5 Mei 1946, sebagai upaya mempertahankan negara Republik Indonesia, maka dalam rapat yang dihadiri anggota-anggota Persatuan Perjuangan kecuali Perwari dan PKI memutuskan seja tanggal 4 Juni 1946 Persatuan Perjuangan dibubarkan dan memerintahkan untuk sesegera mungkin menerbitkan buku peringatan Persatuan Perjuangan yang memuat sejarah perjuangan organisasi.²⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan dalam bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua cara yang dilakukan dalam menghadapi kedatangan Belanda dan Sekutu. Pemerintah pusat dibawah Presiden Soekarno-Hatta dan Perdana Menteri Sjahrir menggunakan politik diplomasi, sedangkan Persatuan Perjuangan memilih berkonfrontasi langsung dengan Belanda dan Sekutu karena sesuai dengan semangat rakyat Indonesia khususnya para kaum pemuda. Tan Malaka kemudian mendirikan Volksfront tanggal 5 Januari di Purwokerto yang kemudian berganti nama menjadi Persatuan Perjuangan, Persatuan Perjuangan mempunyai Minimum Program untuk diperjuangkan dan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia secara utuh.

Dalam perannya dalam keberhasilan revolusi Indonesia, Persatuan Perjuangan memerintahkan untuk memperkuat persatuan agar perjuangan rakyat Indonesia tidak terpecah-belah. Untuk mewujudkan Minimum Program, Persatuan Perjuangan mengirimkan delegasi untuk berunding agar terjalin kerjasama antara pemerintah dibawah Perdana Menteri Sjahrir dengan Persatuan Perjuangan, karena tidak mendapatkan tanggapan yang serius Persatuan Perjuangan menggalang aksi besar-besaran agar pemerintah menyetujui Minimum Program yang merupakan usaha untuk mewujudkan cita-cita rakyat Indonesia. Karena tidakusaha yang dilakukan Persatuan Perjuangan tetap tidak sejalan dengan pemerintah, Persatuan Perjuangan memutuskan untuk tidak masuk dalam kabinet Perdana Menteri Sjahrir dan menjadi organisasi oposisi dalam pemerintahan. mengundurkan

²⁵ "Mosi Rapat Persatoean Perdjoengan Tentang Penangkapan Pemimpin". Kedaulatan Rakjat, 6 April 1946.

²⁶ "Persatoean Perdjoengan Diboebarkan". Soeara Rakjat. 6 Juni 1946.

diri karena dinilai lambat dalam mengambil sikap untuk menghadapi Belanda dan sekutunya.

Perbedaan cara yang dilakukan Persatuan Perjuangan dengan pemerintah berakibat pada penangkapan tokoh-tokoh penting organisasi seperti Tan Malaka, Soekarno, Abikusno, Mohammad Yamin, Sukarno, Sayuti Melik, dan Chaerul Shaleh. Penangkapan ini didasarkan karena posisi Persatuan Perjuangan mengancam kedudukan kabinet dan stabilitas keamanan Indonesia.

Ditangkapnya para tokoh Persatuan Perjuangan membuat peran organisasi ini semakin berkurang karena terus ditekan oleh pemerintah pusat baik dari dalam dan luar organisasi sehingga semakin hilang dukungan dari organisasi-organisasi yang tergabung dalam Persatuan Perjuangan. Pada tanggal 4 Juni 1946, akhirnya Persatuan Perjuangan resmi dibubarkan dan diterbitkanlah buku peringatan Persatuan Perjuangan yang berisikan sejarah perjuangan organisasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang perlu di ingat bahwa sebuah peristiwa sejarah bisa kita jadikan cermin dan pelajaran yang berharga dalam kehidupan manusia saat ini. Melihat pembahasan dalam penelitian ini, seharusnya pemerintah pusat lebih memperhatikan keinginan rakyat dan pemuda Indonesia. Pemerintah juga tidak bisa semena-mena menghalangi perjuangan sebuah organisasi yang berjuang demi kemerdekaan Indonesia secara penuh meskipun cara yang digunakan berbeda. Pemerintah harus dapat merangkul semua organisasi meskipun dalam penelitian ini Persatuan Perjuangan berada pada peran oposisi. Jika pemerintah mampu mempersatukan perbedaan yang ada kemerdekaan secara penuh akan dapat diraih dengan cepat, karena persatuan dan kesatuan merupakan syarat utama dalam tegaknya negara yang merdeka dan berdaulat secara utuh.

Belajar dari penelitian ini sudah saatnya kita sebagai mahasiswa tidak selalu berpikir diskriminatif dan hanya melihat dari satu sudut pandang saja terutama yang berkaitan dengan sejarah-sejarah yang dinilai bertentangan dengan pemerintah karena pada intinya sekalipun berbeda dalam caranya tujuannya tetap sama yakni demi kemerdekaan Indonesia. Semoga kedepannya penelitian ini dapat dijadikan rujukan sebagai pembelajaran sejarah dan sarana belajar bagi generasi penerus bangsa bahwa masih banyak sejarah Indonesia yang belum tertulis secara jelas, dan semoga ada penulis-penulis lain yang mampu menyempurnakan penulisan sejarah mengenai organisasi-organisasi oposisi lainnya atau organisasi Persatuan Perjuangan.

SUMBER

A. Koran

Boeroeh. 10 Januari 1946. *Volksfront (Soerat Terboeka dari Panitia Permoesjawaratan ke-II Pembentoean Volksfront)*.
Boeroeh. 15 Februari 1946. *Sekretariat Persatoean Perdjoengan*.

Boeroeh. 12 Maret 1946. *Introeksi Persatoean Perdjoengan*.
Boeroeh. 13 Maret 1946. *Samakah Progam Pemerintah Dengan Progam Pers. Perdjoengan ?*.
Gelombang Zaman. 14 Januari 1946. *Soerat Terboeka Kepada Bapakoe Tan Malaka*.
Gelombang Zaman. 21 Januari 1946. *Tan Malaka Dihadapan Volksfront*.
Gelombang Zaman. 18 Maret 1946. *Sebabnja Persatoean Perdjoengan Petjah*.
Kedaulatan Rakjat. 11 November 1945. *Presiden Mengesahkan Kabinet Sjahrir*.
Kedaulatan Rakjat. 16 Januari 1946. *Persatoean Perdjoengan Rakjat Lahir*.
Kedaulatan Rakjat. 17 Januari 1946. *Resoloesi Kongres Persatoean Perdjoengan*.
Kedaulatan Rakjat. 19 Januari 1946. *Kemerdekaan 100%*.
Kedaulatan Rajat. 15 februari 1946. *Aksi Oemoem Toentoetan Kemerdekaan 100%*.
Kedaulatan Rakjat. 28 Januari 1946. *Secretariat Persatoean Perdjoengan Dibentoeak*.
Kedaulatan Rakjat. 30 Januari 1946. *Rapat Besar Persatoean Perdjoengan*.
Kedaulatan Rakjat. 7 Februari 1946. *Progam Rakjat jang Berdjoeng*.
Kedaulatan Rakjat. 15 Februari 1946. *Aksi Oemoem Toentoetan Kemerdekaan 100%*.
Kedaulatan Rakjat. 19 Maret 1946. *Anggaran Dasar Persatoean Perdjoengan*.
Kedaulatan Rakjat. 20 Maret 1946. *Tan Malaka dan Soekarni Ditangkap*.
Kedaulatan Rakjat. 23 Maret 1946. *Keterangan Pemerintah*.
Kedaulatan Rakjat. 6 April 1946. *Mosi Rapat Persatoean Perdjoengan Tentang Penangkapan Pemimpin2*.
Lasjkar. 12 Februari 1946. *Pendirian Badan Pekerja Komite Nasional Poesat*.
Merdeka. 20 Februari 1946. *Kepertjajaan Sepenuhnja Kepada Pemerintah*.
Penghela Rakjat. 30 Januari 1946. *Persatoean Perdjoengan Mengirimkan Delegasi Kepada Pemerintah Repoeblik Indonesia*.
Penghela Rakjat. 6 Maret 1946. *Politik Kabinet Baroe*.
Penghela Rakjat. 13 Maret 1946. *Kabinet Baroe*.
Soera Rakjat. 6 Juni 1946. *Persatoean Perdjoengan Diboebarkan*.
Soera Rakjat. 22 Juni 1946. *Pemerintah dan Partai*.

Buku

Adams, Cindy. 1963. *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat*. Jakarta: Gunung Agung.
Anderson, Bens. 1998. *Revolusi Pemuda; Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*. Jakarta: Sinar Harapan.
Badruddin. 2014. *Kisah Tan Malaka Dari Balik Penjara Dan Pengasingan*. Yogyakarta: Araska.
Bagus, Lorens. 1996. *Kamus Filsafata*. Jakarta: Gramedia.
Djoened, Marwati dan Nugroho Notosusanto. 1992. *Sejarah Nasional Indonesia VI (edisi IV)*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Fakih, Abraham Ali. 2015. *Dari Penjara ke Penjara*. Yogyakarta: Palapa.
- Kahin, George Mc Turman. 1995. *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Jakarta: UNS Press.
- Kasdi, Aminudin. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press.
- Koentjaraningrat. 1977. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Malaka, Tan. 2000. *Dari Penjara ke Penjara Jilid III*. Jakarta: Teplok Press.
- Malik, Adam. 1979. *Mengabdikan Republik Jilid II: Angkatan 45*. Jakarta: Gunung Agung.
- Moejanto, G. 1988. *Indonesia abad ke 20 Jilid I*. Yogyakarta: Kanisius.
- Paharizal dan Ismantoro D. Yuwono. 2014. *Misteri Kematian Tan Malaka*. Yogyakarta: Penerbit Narasi
- Philipus dan Aini. 2004. *Sosiologi dan Politik; Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Penerangan, Departemen. 1970. *Susunan dan Progam Kabinet Republik Indonesia 1956-1970*. Jakarta: Penerbit Prandja Paramita.
- Poeze, Harry A. 2008. *Tan Malaka, Gerakan Kiri, Dan Revolusi Indonesia Jilid I*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Rahman, Masykur Arif . 2013. *Tan Malaka, Pahlawan Besar Yang Dilupakan Sejarah*. Yogyakarta: Palapa.
- Sastrosutomo, Soebadio. 1987. *Perjuangan Revolusi*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Sudyarto, Sides. 2004. *Tingkah Laku Politik Panglima Besar Jenderal Soedirman; Soedirman-Tan Malaka dan Persatuan Perjuangan*. Jakarta: Restu Agung.
- Swasono, Meutia Farida. 1981. *Bung Hatta Pribadinya Dalam Kenangan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Tirtoprodjo, Drs. Susanto. 1966. *Sedjarah Revolusi Nasional Indonesia Tahapan Revolusi Bersendjata 1945-1950*. Jakarta: PT. Pembangunan.
- Yamin, Mohammad. 1953. *Sapta Dharma*. Jakarta: N. U. Nusantara.

Sumber Jurnal

- Faisal dan Firdaus Syam. 2015. *Tan Malaka Revolusi Indonesia Terkini (Tan Malaka, the Latest Indonesia's Revolution)*. Jakarta: Universitas Nasional.
- Farudy, Irwan. 2003. *Pengaruh Pemikiran Tan Malaka Tentang Revolusi Indonesia Terhadap Organisasi Persatuan Perjuangan Tahun 1946*. Surabaya: Unesa Press.